

DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI BERAU, KECAMATAN TALIYASAN

Aditiya Bangun Triyuda¹⁾, Rofiatul Afifah²⁾, Ulul Azqmi³⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received May 10, 2024 Revised May 15, 2024 Accepted Jun 10, 2024</p> <p>Keywords: Kebijakan agraria, ketahanan pangan, Berau, redistribusi lahan, kesejahteraan petani</p>	<p>Kebijakan agraria di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan pangan nasional. Artikel ini mengkaji dampak kebijakan agraria terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan meneliti implementasi kebijakan redistribusi lahan dan reforma agraria, studi ini mengevaluasi perubahan dalam produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria di Berau berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya.</p> <p style="text-align: center;">This is an open-acces article under the CC-BY 4.0 license.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Corresponding Author:

Aditiya Bangun Triyuda

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: aditiya@gmail.com

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Distribusi lahan yang tidak merata dan penguasaan lahan oleh sejumlah orang menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya agraria. Kebijakan agraria yang bertujuan untuk redistribusi lahan dan reformasi agraria diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang berkaitan erat dengan kebijakan agraria. Sejarah kebijakan agraria di Indonesia menunjukkan adanya berbagai perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala yang berpengaruh pada ketahanan pangan.

Sektor pertanian di Indonesia mengalami berbagai tantangan yang memengaruhi ketahanan pangan. Distribusi lahan yang tidak merata mengakibatkan banyak petani kecil kekurangan lahan untuk bercocok tanam secara efektif, sementara lahan-lahan subur banyak dikuasai oleh perusahaan besar atau individu dengan penguasaan lahan yang luas. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di kalangan petani kecil dan berdampak negatif pada produksi pangan nasional. Di sisi lain, kebijakan agraria yang bertujuan untuk redistribusi lahan dan reformasi agraria memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Sejarah kebijakan agraria di Indonesia mencakup berbagai upaya untuk mengatasi masalah distribusi lahan. Mulai dari penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 hingga berbagai program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan konflik lahan. Masalah-masalah ini menjadi penghalang dalam mencapai tujuan akhir dari kebijakan agraria, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Distribusi lahan yang tidak merata merupakan salah satu isu utama dalam kebijakan agraria di Indonesia. Sebagian besar lahan pertanian subur dikuasai oleh perusahaan besar atau individu yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, sementara petani kecil hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang signifikan di pedesaan. Petani kecil yang memiliki lahan sempit sering tidak mampu menghasilkan cukup pangan, yang membuat kondisi memperparah masalah ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi lahan yang tidak merata mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia, terkhusus pada Kabupaten Berau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan redistribusi lahan dan reforma agraria di Kabupaten Berau, Desa Taliyasan?
3. Bagaimana kebijakan agraria dapat meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dampak distribusi lahan yang tidak merata terhadap ketahanan pangan di Indonesia terkhusus pada Kabupaten Berau.
2. Mengevaluasi kendala dalam implementasi kebijakan redistribusi lahan dan reforma agraria di Kabupaten Berau, Desa Taliyasan.
3. Mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani melalui kebijakan agraria yang efektif.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan agraria terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki program redistribusi lahan dan reforma agraria aktif, seperti Kabupaten Berau. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi dan intensitas implementasi kebijakan agraria di daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan. Selain itu juga menggunakan metode normatif dengan tujuan melihat kebijakan Agraria. Dengan metode penelitian empiris, normatif dan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan agraria terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Melalui penggalian pengalaman dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan distribusi lahan yang adil, produksi pertanian, dan kesejahteraan petani di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

1.1 Dampak Kebijakan Agraria terhadap Produksi Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi lahan dan program reforma agraria berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan di daerah penelitian. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan agraria masih menghadapi tantangan, seperti birokrasi yang lambat dan konflik lahan. Beberapa isi penting kebijakan agraria yang diatur dalam undang-undang dan regulasi terkait:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan utama kebijakan agraria di Indonesia. Beberapa isi penting yang relevan terhadap produksi pertanian adalah:

- Pasal 2: Mengatur bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Pasal 7: Melarang penguasaan tanah secara berlebihan dan mewajibkan redistribusi tanah agar tidak terjadi monopoli.
- Pasal 10: Mengatur kewajiban pemilik tanah untuk mengusahakan atau mengelola tanahnya secara aktif, khususnya untuk kegiatan pertanian, dengan tujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat.

- Pasal 13: Menyebutkan bahwa pemerintah harus mengadakan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, yang termasuk dalam hal ini adalah tanah pertanian.

2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian memberikan ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan redistribusi tanah. Beberapa poin penting adalah:

- Pasal 2: Menetapkan pembagian tanah untuk keperluan pertanian bagi petani yang tidak mempunyai atau kekurangan tanah.
- Pasal 5: Mengatur prosedur pengadaan tanah untuk redistribusi, termasuk identifikasi tanah yang akan dibagi dan persyaratan bagi penerima tanah.

A. Peningkatan Produksi Pertanian di Berau

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan kebijakan agraria. Distribusi lahan yang tidak merata dan penguasaan lahan oleh sejumlah orang menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya agraria, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kebijakan agraria yang bertujuan untuk redistribusi lahan dan reformasi agraria diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan ketahanan pangan. Sejarah kebijakan agraria di Indonesia menunjukkan adanya berbagai perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala yang berpengaruh pada ketahanan pangan. Dengan akses lahan yang lebih baik, petani dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka melalui penggunaan teknik pertanian modern dan teknologi yang lebih efisien. Hal ini terbukti dari peningkatan produksi padi sebesar 15% dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan ini.

Redistribusi lahan tidak hanya memberikan kesempatan bagi petani kecil untuk memperluas lahan tanam mereka tetapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam praktik pertanian. Dengan kepemilikan lahan yang lebih pasti dan luas, petani lebih berani mengambil risiko untuk mengadopsi teknologi baru dan melakukan perbaikan dalam metode pertanian mereka. Selain itu, program redistribusi lahan sering kali disertai dengan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan teknis dan penyediaan akses ke sumber daya pertanian, seperti benih unggul dan pupuk. Kabupaten Berau adalah salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi agraria besar namun menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi lahan dan ketahanan pangan. Sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, tetapi distribusi lahan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan akses terhadap lahan yang subur. Kebijakan agraria diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini dengan redistribusi

lahan kepada petani kecil. Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan dan bantuan teknis kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan alat dan teknologi pertanian modern.

Teknologi seperti sistem irigasi yang lebih efisien, varietas benih unggul, dan pemupukan yang tepat telah membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit tanaman. Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik, misalnya, telah memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup sepanjang musim tanam, bahkan saat musim kemarau. Teknologi irigasi tetes dan sprinkler telah diadopsi oleh banyak petani di Berau, yang memungkinkan mereka menghemat air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Varietas benih unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit juga telah diperkenalkan kepada petani, sehingga meningkatkan ketahanan tanaman dan hasil panen. Program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan penting dalam peningkatan produksi pertanian di Berau. Petani diberikan pelatihan mengenai teknik-teknik pertanian modern, manajemen lahan, dan cara mengakses pasar. Pendampingan ini tidak hanya membantu petani meningkatkan produksi mereka tetapi juga membantu mereka mengelola usaha pertanian mereka secara lebih efisien dan berkelanjutan.

B. Modernisasi dan Teknologi Pertanian

Selain redistribusi lahan, kebijakan agraria di Kabupaten Berau juga mendorong modernisasi dan penggunaan teknologi pertanian yang lebih canggih. Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan dan bantuan teknis kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan alat dan teknologi pertanian modern.

Teknologi seperti sistem irigasi yang lebih efisien, varietas benih unggul, dan pemupukan yang tepat telah membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit tanaman. Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik, misalnya, telah memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup sepanjang musim tanam, bahkan saat musim kemarau. Teknologi irigasi tetes dan sprinkler telah diadopsi oleh banyak petani di Kabupaten Berau, yang memungkinkan mereka menghemat air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Varietas benih unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit juga telah diperkenalkan kepada petani, sehingga meningkatkan ketahanan tanaman dan hasil panen. Modernisasi yang dimaksud antara lain terkait:

1. Penggunaan Benih Unggul
 - a. Varietas Superior: Benih unggul yang telah melalui proses seleksi dan pemuliaan untuk memiliki karakteristik superior, seperti hasil panen lebih tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta toleransi terhadap kondisi lingkungan yang kurang optimal.
 - b. Pengembangan: Pemerintah dan lembaga penelitian agrikultur mengembangkan dan memperkenalkan berbagai jenis benih unggul kepada petani.

- c. Peningkatan Produksi: Penggunaan benih unggul terbukti meningkatkan produksi tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman hortikultura lainnya.
2. Sistem Irigasi Modern
 - a. Efisiensi Penggunaan Air: Teknologi irigasi modern seperti irigasi tetes dan irigasi sprinkler menggantikan sistem irigasi tradisional yang boros air.
 - b. Irigasi Tetes: Mengalirkan air langsung ke akar tanaman melalui pipa kecil, mengurangi penguapan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air.
 - c. Irigasi Sprinkler: Mengoptimalkan distribusi air pada lahan pertanian, memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup sepanjang musim tanam.
 3. Mekanisasi Pertanian
 - a. Penggunaan Mesin Pertanian: Traktor, mesin tanam, mesin pemanen, dan alat-alat pertanian lainnya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan mempercepat proses produksi.
 - b. Efisiensi Produksi: Mekanisasi membantu meningkatkan efisiensi, mengatasi kekurangan tenaga kerja, dan mempercepat aktivitas pertanian.
 - c. Dukungan Pemerintah: Program subsidi dan bantuan kredit untuk memfasilitasi petani dalam membeli dan menggunakan peralatan mekanis.
 4. Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang Tepat
 - a. Optimalisasi Nutrisi Tanaman: Pupuk yang tepat menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman untuk tumbuh optimal.
 - b. Pengendalian Hama dan Penyakit: Pestisida yang efektif melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit.
 - c. Pelatihan Penggunaan: Pemerintah memberikan pelatihan tentang dosis yang sesuai, waktu aplikasi yang tepat, dan pengelolaan hama terpadu.
 5. Pertanian Presisi
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Menggunakan sensor tanah, drone, GPS, dan perangkat lunak analitik untuk memantau kondisi lahan dan kesehatan tanaman.
 - b. Optimalisasi Input Pertanian: Teknologi ini memungkinkan pengelolaan input pertanian (air, pupuk, pestisida) secara efisien berdasarkan kebutuhan spesifik setiap bagian lahan.
 - c. Efisiensi dan Hasil Panen: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan hasil panen.

Modernisasi dan teknologi pertanian merupakan kunci untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui penggunaan benih unggul, sistem irigasi modern, mekanisasi pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, pertanian presisi, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, program pelatihan dan pendidikan, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan, Indonesia dapat mencapai peningkatan signifikan dalam produksi pertanian. Upaya modernisasi ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Implementasi kebijakan yang tepat dan komitmen politik yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa modernisasi pertanian dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan ketahanan pangan nasional.

1.2 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Agraria

Implementasi kebijakan agraria di Indonesia, meskipun bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan dan meningkatkan ketahanan pangan, sering kali

menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan agraria di Indonesia:

A. Birokrasi Kompleks dan Konflik Lahan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan agraria adalah birokrasi yang lambat dan kompleks. Proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali menghambat redistribusi lahan. Prosedur administrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mendistribusikan lahan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses ini menambah kompleksitas birokrasi. Selain itu konflik lahan merupakan masalah serius yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan agraria. Konflik ini biasanya terjadi antara petani kecil dan perusahaan besar atau individu yang memiliki penguasaan lahan yang luas. Banyak kasus di mana lahan yang seharusnya didistribusikan kepada petani kecil masih berada dalam sengketa hukum atau dikuasai secara ilegal. Konflik lahan sering kali melibatkan kekerasan dan menimbulkan ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas di daerah pedesaan.

Contoh konkret adalah petani yang memenuhi syarat untuk menerima lahan melalui program redistribusi sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka. Proses pengajuan permohonan, verifikasi data, pengukuran lahan, dan penerbitan sertifikat sering kali menghadapi kendala administratif yang memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini dapat menurunkan motivasi petani dan kepercayaan terhadap program pemerintah. Penyebab utama konflik lahan meliputi tumpang tindih klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas-batas lahan, dan penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan atau tambang yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Penyelesaian konflik lahan memerlukan pendekatan yang inklusif dan adil, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam dialog dan mediasi. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh kepentingan-kepentingan yang kuat dan kurangnya mekanisme penyelesaian yang efektif.

B. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan tantangan serius dalam implementasi kebijakan agraria. Pejabat yang terlibat dalam proses redistribusi lahan sering kali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Misalnya, ada kasus di mana lahan yang seharusnya didistribusikan kepada petani kecil dialihkan kepada individu atau perusahaan yang memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat terkait. Korupsi semacam ini merusak integritas program redistribusi lahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah tegas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi lahan. Penerapan sistem pengawasan yang ketat, pelaporan publik, dan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan LSM dalam memantau proses redistribusi lahan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

C. Sumber Daya serta Tantangan Sosial Budaya

Implementasi kebijakan agraria sering kali terhambat oleh kekurangan sumber daya dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas redistribusi lahan sering kali kekurangan tenaga kerja terlatih, peralatan, dan anggaran untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Kekurangan sumber daya ini

memperlambat proses administrasi dan mengurangi efektivitas program redistribusi lahan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam redistribusi lahan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas lapangan, penyediaan peralatan yang diperlukan, dan peningkatan anggaran operasional adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

Disisi lain tantangan sosial dan budaya juga mempengaruhi implementasi kebijakan agraria. Di beberapa daerah, nilai-nilai adat dan tradisi lokal masih kuat dan mempengaruhi cara masyarakat melihat kepemilikan dan penggunaan lahan. Misalnya, di beberapa komunitas adat, lahan dianggap sebagai milik bersama yang tidak dapat dialihkan atau dijual. Hal ini bisa bertentangan dengan konsep kepemilikan individu yang diterapkan dalam kebijakan agraria nasional. Resistensi dari masyarakat lokal terhadap perubahan dalam penguasaan dan penggunaan lahan dapat menghambat implementasi kebijakan agraria. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Dialog dan konsultasi dengan komunitas lokal, serta penghargaan terhadap nilai-nilai adat dan tradisi, dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan agraria.

1.3 Studi Kasus Dampak Kebijakan Agraria Desa Taliyasan

Kabupaten Berau, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi agraria yang besar namun juga menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi lahan dan ketahanan pangan. Seiring dengan upaya pemerintah pusat dalam melakukan reformasi agraria, Berau telah menjadi fokus implementasi kebijakan redistribusi lahan untuk memperbaiki distribusi lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Berau telah aktif melaksanakan program reforma agraria sebagai bagian dari upaya redistribusi lahan. Program ini melibatkan identifikasi dan pembagian lahan-lahan yang tidak produktif atau terlantar kepada petani kecil yang membutuhkan. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Berau menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 hektar lahan telah didistribusikan kepada sekitar 1.500 petani kecil dalam tiga tahun terakhir.

A. Peningkatan Produksi Pertanian

Salah satu contoh sukses adalah Desa Talisayan, di mana redistribusi lahan berhasil meningkatkan produksi padi dari rata-rata 3 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Peningkatan ini disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap lahan subur dan bantuan pelatihan serta teknologi pertanian dari pemerintah.

Redistribusi lahan juga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Pendapatan petani di Desa Talisayan meningkat sekitar 30% sejak redistribusi lahan. Selain itu, petani mulai diversifikasi usaha dengan menanam komoditas lain seperti jagung dan sayuran, serta memelihara ternak untuk meningkatkan pendapatan mereka. Diversifikasi ini membantu petani mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga mereka.

B. Diversifikasi Tanaman dan Usaha Pertanian

Redistribusi lahan tidak hanya meningkatkan produksi padi, tetapi juga mendorong diversifikasi tanaman dan usaha pertanian. Banyak petani mulai menanam tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Beberapa petani juga mulai beternak unggas dan ikan sebagai tambahan penghasilan.

Diversifikasi ini membantu petani mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis tanaman dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga mereka.

Dampak positif redistribusi lahan juga terlihat dari peningkatan penggunaan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyediakan pelatihan dan bantuan teknis untuk mendorong penggunaan teknologi seperti mesin tanam, sistem irigasi tetes, dan varietas benih unggul. Data survei menunjukkan bahwa sekitar 70% petani penerima lahan kini menggunakan setidaknya satu bentuk teknologi pertanian modern, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Meskipun ada banyak keuntungan dari redistribusi lahan, implementasi kebijakan ini di Berau tidak bebas dari tantangan. Beberapa petani mengeluhkan proses administrasi yang lambat dan rumit dalam mendapatkan sertifikat tanah. Konflik lahan juga masih terjadi di beberapa desa, terutama antara petani penerima lahan dan pemilik tanah sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan irigasi di beberapa daerah pedesaan menghambat optimalisasi penggunaan lahan. Redistribution lahan di Berau juga membawa dampak positif terhadap komunitas lokal. Komunitas yang sebelumnya terfragmentasi oleh konflik lahan mulai membangun solidaritas dan kerja sama. Program redistribusi lahan memfasilitasi pembentukan kelompok tani yang bekerja sama dalam mengelola lahan, berbagi pengetahuan, dan mengakses pasar. Peningkatan kesejahteraan petani juga berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup di desa-desa yang terlibat. Redistribution lahan di Kabupaten Berau telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi padi, diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi pertanian modern, dan peningkatan pendapatan petani adalah beberapa hasil nyata dari program ini. Namun, tantangan seperti birokrasi yang lambat, konflik lahan, dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan agraria ini. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, redistribusi lahan dapat terus berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Data Real: Produksi Padi di Desa Talisayan

Sebelum Redistribution:

- a) Luas lahan rata-rata per petani: 0,5 hektar
- b) Produksi padi rata-rata: 3 ton per hektar

Setelah Redistribution:

- a) Luas lahan rata-rata per petani: 1,5 hektar
- b) Produksi padi rata-rata: 5 ton per hektar

1.4 Peran Pemerintah dan Lembaga Swadaya dalam Mendukung Kesejahteraan Petani

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur pertanian, subsidi, dan program pelatihan. LSM, di sisi lain, dapat membantu dalam advokasi hak-hak petani, memberikan bantuan teknis, dan memfasilitasi dialog antara petani dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas petani sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dapat

diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ketahanan pangan.

Dengan semua tantangan dan peluang yang ada, kebijakan agraria yang efektif dan inklusif memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kebijakan yang memperhatikan distribusi lahan yang adil, pemberdayaan petani, dan pengembangan teknologi pertanian dapat meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Namun, implementasi kebijakan agraria harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

A. Peran Pemerintah

1. Pembuatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Beberapa kebijakan penting meliputi:

- a. Kebijakan Agraria: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan berbagai peraturan turunannya memberikan kerangka hukum untuk redistribusi lahan dan reforma agraria. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Perlindungan Lahan Pertanian: Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan berfungsi untuk melindungi lahan pertanian dari konversi yang tidak terkendali, memastikan ketersediaan lahan untuk produksi pangan.
- c. Dukungan Finansial: Program subsidi input pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta kredit pertanian dengan bunga rendah, membantu petani mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

2. Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian:

- a. Infrastruktur Irigasi: Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi lahan pertanian, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan.
- b. Akses Jalan dan Transportasi: Pembangunan jalan dan jembatan di daerah pedesaan untuk memudahkan akses petani ke pasar, pusat distribusi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur transportasi yang baik membantu petani mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian.
- c. Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan: Pembangunan fasilitas penyimpanan, seperti silo dan gudang, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pasca-panen dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

3. Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas petani:

- a. Program Pelatihan: Melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, pemerintah menyediakan pelatihan teknik budidaya modern, manajemen lahan, penggunaan teknologi pertanian, dan praktik pertanian berkelanjutan. Program ini sering kali dilaksanakan dalam bentuk Sekolah Lapang, di mana petani dapat belajar secara praktis di lapangan.

- b. Pendidikan Formal: Pendirian sekolah pertanian dan program pendidikan formal lainnya untuk menciptakan generasi muda yang terampil di bidang pertanian. Ini termasuk program diploma dan sarjana di perguruan tinggi pertanian.
 - c. Sekolah Lapang: Sekolah lapang adalah inisiatif yang mengajarkan petani secara praktis tentang teknologi dan metode pertanian yang lebih efisien dan produktif. Petani diajak belajar langsung di lahan pertanian dengan bimbingan dari penyuluh pertanian.
4. Penyediaan Teknologi dan Inovasi
- Untuk mendorong modernisasi pertanian, pemerintah mendukung pengembangan dan penerapan teknologi pertanian:
- a. Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian melalui lembaga seperti Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini termasuk pengembangan varietas benih unggul, teknologi irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.
 - b. Transfer Teknologi: Pemerintah menyediakan akses dan pelatihan kepada petani mengenai teknologi baru. Misalnya, program mekanisasi pertanian yang menyediakan traktor dan alat-alat modern lainnya kepada petani dengan subsidi pemerintah.
 - c. Sistem Informasi Pertanian: Pengembangan sistem informasi pertanian berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi mobile yang memberikan informasi cuaca, harga pasar, dan teknik budidaya kepada petani.

B. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Advokasi Hak-Hak Petani

LSM memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak petani:

- a. Perjuangan Hak Atas Tanah: LSM seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berperan dalam advokasi hak-hak petani, terutama dalam kasus sengketa lahan. Mereka memberikan bantuan hukum, mediasi, dan dukungan kepada petani yang menghadapi konflik lahan.
- b. Peningkatan Kesadaran: LSM melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak petani dan pentingnya reformasi agraria, baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

LSM juga berperan dalam meningkatkan kapasitas petani melalui program pendidikan dan pelatihan:

- a. Pendidikan Non-Formal: LSM mengadakan lokakarya, seminar, dan program pendidikan non-formal lainnya untuk meningkatkan keterampilan petani dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pengelolaan keuangan.
- b. Pendampingan Teknis: LSM memberikan pendampingan teknis dan konsultasi lapangan untuk membantu petani mengatasi masalah-masalah teknis dalam budidaya dan manajemen pertanian.

3. Pengembangan Komunitas

LSM membantu dalam pengembangan komunitas petani:

- a. Pembentukan Kelompok Tani: LSM membantu dalam pembentukan dan penguatan kelompok tani, yang berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan antar petani.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: LSM mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha tani terpadu, koperasi petani, dan akses ke pasar.

4. Penyediaan Akses ke Pasar

LSM memfasilitasi akses petani ke pasar:

- a. Jaringan Pemasaran: LSM membantu petani dalam membangun jaringan pemasaran, menghubungkan mereka dengan pembeli dan pasar yang lebih luas, serta memfasilitasi akses ke pasar yang adil dan berkelanjutan.
- b. Promosi Produk Lokal: LSM mempromosikan produk pertanian lokal dan organik melalui pameran, bazar, dan platform online untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk petani.

5. Penerapan Teknologi Pertanian

LSM juga berperan dalam penerapan teknologi pertanian:

- a. Demonstrasi Lapangan: LSM sering mengadakan demonstrasi lapangan untuk menunjukkan manfaat teknologi pertanian modern dan praktik terbaik kepada petani.
- b. Akses ke Teknologi: LSM memberikan akses dan pelatihan kepada petani mengenai teknologi baru, serta membantu dalam pengadaan alat dan mesin pertanian.

C. Kolaborasi antara Pemerintah dan LSM

Kolaborasi antara pemerintah dan LSM sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mendukung kesejahteraan petani. Beberapa bentuk kolaborasi yang efektif meliputi:

- a. Program Bersama: Pelaksanaan program pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan petani secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh. Misalnya, program Sekolah Lapang yang melibatkan penyuluh dari pemerintah dan LSM.
- b. Pertukaran Informasi: Berbagi informasi dan data antara pemerintah dan LSM untuk perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih baik.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Bekerja sama dalam pemberdayaan komunitas petani, termasuk pembentukan kelompok tani, koperasi, dan inisiatif ekonomi lokal.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap program-program yang dijalankan untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan.

D. Contoh Nyata Implementasi

1. Program Desa Mandiri Pangan (DMP)

Program ini adalah inisiatif pemerintah yang bekerja sama dengan LSM untuk menciptakan desa-desa mandiri pangan. Dalam program ini, pemerintah menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur, sementara LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan pendampingan teknis. Hasilnya adalah peningkatan produksi pangan lokal dan kesejahteraan petani di desa-desa yang terlibat.

2. Proyek Irigasi Tetes di Lombok

Pemerintah dan LSM seperti Yayasan Kehati bekerja sama untuk memperkenalkan sistem irigasi tetes di Lombok. Pemerintah menyediakan dana dan peralatan, sementara LSM memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi penggunaan air dan peningkatan hasil panen di daerah yang sebelumnya mengalami kekeringan.

3. Advokasi Konflik Lahan di Kalimantan

Di Kalimantan, LSM seperti WALHI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. LSM menyediakan bantuan hukum dan mediasi, sementara pemerintah berperan dalam penegakan hukum dan redistribusi lahan. Kolaborasi ini berhasil menyelesaikan beberapa kasus konflik lahan dan memberikan kepastian hukum bagi petani.

Peran pemerintah dan LSM dalam mendukung kesejahteraan petani di Indonesia sangatlah vital. Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, infrastruktur, pelatihan, dan dukungan finansial yang diperlukan, sementara LSM berfokus pada advokasi, pendidikan, pengembangan komunitas, dan penerapan teknologi pertanian. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan LSM dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi petani, meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, upaya ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan petani dan ketahanan pangan di Indonesia.

CONCLUSION

Studi ini menggambarkan kompleksitas dan pentingnya kebijakan agraria dalam konteks meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Berbagai aspek dan implementasi kebijakan agraria telah dibahas untuk menyoroti tantangan, peluang, serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan masyarakat petani. Yang menjadi fokus, distribusi lahan yang tidak merata dan penguasaan lahan yang terkonsentrasi menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Kebijakan agraria, seperti redistribusi lahan dan reforma agraria, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan ini dengan cara memperbaiki akses petani ke sumber daya agraria yang penting untuk produksi pangan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi lahan dan reforma agraria memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi pertanian, terutama di studi kasus Kabupaten Berau, Desa Taliyasan. Di sana, program redistribusi lahan telah berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara signifikan.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan agraria seperti birokrasi yang lambat, konflik lahan, dan kurangnya pendanaan terus menjadi penghalang utama. Dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan keberlanjutan kebijakan agraria yang efektif. Pemerintah memiliki peran krusial dalam pembuatan kebijakan, penyediaan infrastruktur, pelatihan, serta dukungan finansial bagi petani. Di samping itu, peran LSM dalam advokasi, pendidikan, pengembangan komunitas, dan penerapan teknologi pertanian turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani. Kesimpulannya, kolaborasi yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat petani perlu diperkuat untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan agraria: meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara agraris yang berdaulat

pangan dan meningkatkan kualitas hidup petani secara signifikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari studi ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan agraria dan mendukung kesejahteraan petani di Indonesia:

1. Penguatan Implementasi Kebijakan Agraria:

Perlu adanya reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam implementasi kebijakan agraria. Pemerintah harus memastikan proses administrasi yang lebih cepat dan transparan agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

2. Penyelesaian Konflik Lahan:

Penting untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik lahan secara adil dan transparan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam mediasi dan advokasi hukum akan sangat mendukung dalam menyelesaikan sengketa tanah yang berkepanjangan.

3. Pemberdayaan Petani Melalui Pendidikan dan Pelatihan:

Program pendidikan formal dan non-formal perlu diperluas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan keberlanjutan lingkungan. Sekolah lapang dan kursus pelatihan terstruktur dapat menjadi solusi efektif.

4. Investasi dalam Infrastruktur Pertanian:

Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan jalan, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kerugian pasca-panen, dan mempermudah akses ke pasar.

5. Pengembangan Teknologi Pertanian:

Dukungan lebih lanjut dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Transfer teknologi dan aplikasi inovasi baru harus diintegrasikan secara luas ke dalam praktik pertanian petani.

REFERENCES

- [1] Adiwibowo, I. (2020). Kebijakan Agraria dan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Agraria*, 15(2), 123-145.
- [2] Badan Pertanahan Nasional. (2018). Laporan Tahunan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau 2018. Berau: BPN Kabupaten Berau.
- [3] Budidarsono, S., & Rosmawati, I. (2021). The impact of agrarian policy on food security: A case study in Central Java Province, Indonesia. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 10(2), 87-102. <https://doi.org/10.5897/JAST2020.0493>
- [4] Departemen Pertanian Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Ketahanan Pangan Nasional.

- [5] Directorate General of Plantation. (2020). Indonesian agricultural development strategy. Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia. Diakses dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=galeri&act=view&id=66>
- [6] Dinas Pertanian Kabupaten Berau. (2020). Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Berau 2020. Berau: Dinas Pertanian Kabupaten Berau.
- [7] Dinas Pertanian Kabupaten Berau. (2021). Data Produksi Pertanian Desa Talisayan. Berau: Dinas Pertanian Kabupaten Berau.
- [8] Government of Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Government of Indonesia.
- [9] Government of Indonesia. (1961). Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Jakarta: Government of Indonesia.
- [10] Pratama, B. (2021). Impact assessment of land redistribution policy on agricultural production in Central Java, Indonesia. *Journal of Agrarian Studies*, 8(1), 45-60. Diakses dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/qhgm3>
- [11] Pratama, Y. (2021). Pengaruh Kebijakan Redistribusi Lahan terhadap Produksi Padi di Jawa Tengah. *Jurnal Pertanian Indonesia*, 17(1), 45-60.
- [12] Sudirman, M. (2022). Konflik Agraria dan Solusinya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Indonesia Maju.
- [13] Suryanto, T. (2019). Distribusi Lahan dan Kesejahteraan Petani di Era Reformasi Agraria. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 22(1), 89-102.